

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Propinsi Jawa Tengah merupakan salah satu dari 34 Propinsi di Indonesia dengan segala potensi sumber daya alam dan posisi yang strategis. Tentunya Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang berupaya meningkatkan perekonomian daerah melalui fenomena paradiplomasi dengan menarik minat para investor asing guna melakukan penanaman modal di provinsi Jawa Tengah. Saat ini Propinsi Jawa Tengah telah didukung dengan kelengkapan infrastruktur sarana dan prasarana yang cukup baik. Banyaknya kekayaan sumber daya alam maupun sumber daya manusia dan tersedianya potensi serta peluang yang siap dikembangkan. Seperti kita ketahui bahwa faktor ekonomi merupakan faktor yang paling mempengaruhi kesejahteraan rakyat di sebuah negara. kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya tentu dengan memanfaatkan sumber-sumber daya yang dimiliki oleh negara tersebut. Dalam upaya negara meningkatkan kesejahteraan rakyat disitu peran pemerintah begitu penting dengan melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat. Dalam sebuah pemerintahan yang baik, diharapkan timbul kebijakan yang tepat pula guna mencapai keadaan ekonomi yang baik.<sup>1</sup> Sebuah pemerintahan yang kuat diperlukan untuk membangun kesejahteraan masyarakat, karena lebih jauh lagi, hal tersebut akan berpengaruh pada pasar secara regional dan bahkan secara internasional.<sup>2</sup> Dengan begitu pemerintah lah yang memang harus berperan aktif dalam upaya mensejahterakan rakyat.

Masa kini tidak hanya pemerintah pusat yang terus bergerak dalam melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi, dengan tumbuhnya globalisasi pemerintah daerah pun dapan menjalankan peran utama dalam melakukan kegiatan ekonomi tanpa harus melalui pemerintah pusat terlebih dahulu. Dengan adanya fenomena paradiplomasi masa sekarang ini, pemerintah daerah atau pemerintah provinsi dapat dengan lebih leluasa dalam meningkatkan ekonomi daerahnya. Paradiplomasi secara relative masih dianggap baru dalam aktivitas pemerintahan di Indonesia. Paradiplomasi mengacu pada

---

<sup>1</sup> Bo Rothstein dan Jan Teorell. *“What is Quality of Governance? A Theory of Impartial Political Institutions”*. **Quality of Governance Paper Series**. Goteberg University, 2005

<sup>2</sup> Budi Winarno, *“Pertarungan Negara VS Pasar”*. MedPress (IKAPI): Jogjakarta, 2009

perilaku dan kapasitas untuk melakukan hubungan luar negeri dengan pihak asing yang dilakukan oleh entitas sub-state, atau pemerintah regional/pemda dalam kepentingan mereka secara spesifik.<sup>3</sup> Disadari Tanpa adanya kerjasama dengan pihak asing atau investor asing baik dengan pemerintahan asing atau organisasi/foundation asing, pertumbuhan ekonomi daerah akan sulit didorong untuk berkembang lebih cepat.<sup>4</sup>

Kerjasama pemerintah daerah dalam fenomena paradiplomasi dapat terjalin dalam berbagai bentuk seperti *sister city*, investasi asing atau dalam bentuk penanaman modal asing. Aliran modal merupakan pemegang peran penting dalam pertumbuhan sebuah negara. Kini, sumber dana dalam kegiatan ekonomi tidak hanya berasal dari internal suatu negara saja. Aliran modal dari luar negeri pun menjadi pilihan yang tepat, bahkan menjadi sumber dana yang penting. Aliran dana dari luar negeri yang disebut dengan *Foreign Direct Investment (FDI)* atau Penanaman Modal Asing (PMA). PMA dikatakan penting karena PMA membawa aliran modal ke dalam suatu negara guna memperkaya negara bersangkutan. Sehubungan dengan kebijakan yang dibentuk oleh sebuah sistem pemerintahan,<sup>5</sup> pemerintah sendiri memiliki peran penting dalam menarik perhatian para investor asing.

Sumber daya alam Jawa Tengah cukup kaya akan potensi baik sumber daya alamnya maupun sumber daya manusia. Provinsi Jawa Tengah memiliki lahan sawah dan Jawa Tengah juga memiliki hutan seluas 650 ribu ha atau 19,97% dari total luas daratannya. Di sektor kelautan dan perikanan, sampai Desember 2006 nilai ekspornya mencapai 17,06 ribu ton atau setara dengan US\$ 70,54 juta. Jumlah meningkat dibanding ekspor 2005, yang hanya mencapai setara dengan US\$ 69,21 juta. Produk ekspor tanaman perkebunan provinsi ini mencakup kopi, teh, tembakau, dan nilam. Dari hasil ekspor sumber daya mineralnya, terutama bahan baku semen, teridentifikasi bahwa kandungan bahan baku antara lain terdapat di Kabupaten Wonogiri (138.289 juta ton), Blora (3,483 juta ton), Grobogan (4.025 juta ton), Kebumen (17.000 juta ton), Pati (1.353 Juta ton) dan Rembang (1.313 juta ton). Ini

---

<sup>3</sup> Stefan Wolff, '*Paradiplomacy: Scope, Opportunities and Challenges*', hal.1-2 dan 13, University of Nottingham, 2009

<sup>4</sup> Takdir Ali Mukti, '*Paradiplomacy: kerjasama Luar Negeri oleh Pemda di Indonesia*', Yogyakarta, The Phinisi Press, 2013, hal.3

<sup>5</sup> Laura Alfaro dan Sebnem Kalemli Ozcan, "*Capital Flow in a Globalized World: The Role of Policies and Institutions*", 2006

semua belum termasuk potensi geothermal yang terdapat di Kabupaten Semarang.<sup>6</sup>

Propinsi Jawa Tengah memang memiliki banyak kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan penduduk mencapai sekitar 33 juta orang. Pada tahun 2014, provinsi Jawa Tengah berada di peringkat 25 dari jumlah 35 provinsi di Indonesia berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan nilai 27.613.04 dalam ribu rupiah.<sup>7</sup> Kepala Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) tahun 2014 Provinsi Jawa Tengah Sujarwanto Dwiatmoko mengungkapkan bahwa Propinsi Jawa Tengah tidak hanya menjadi pasar, namun juga menjadi produsen mengingat banyaknya kekayaan yang dimiliki propinsi Jawa Tengah.<sup>8</sup> Namun, untuk mewujudkannya kebutuhan modal menjadi syarat utama yang harus dipenuhi. Penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) sangat dibutuhkan. Selain untuk mewujudkan propinsi Jawa Tengah sebagai produsen, penanaman modal juga untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Paul Krugman, dalam tesisnya menggambarkan bahwa angka pertumbuhan perekonomian Asia yang menakjubkan sebetulnya didorong oleh masuknya modal asing.<sup>9</sup> Untuk mewujudkan pencapaian penanaman modal sesuai ijin prinsip baik PMA maupun PMDN yang ditargetkan, pemerintah Jawa Tengah telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan iklim investasi di Jawa Tengah. Pemerintah Jawa Tengah juga menciptakan iklim usaha kondusif lewat pelayanan satu pintu (*One Stop Service*), perlindungan investasi (*Task Force*), maupun pemberian Insentif bagi penanam modal.<sup>10</sup>

Masuknya investasi dari luar ke dalam negeri menjadi modal baru dalam proses pembangunan sebuah Daerah, Negara-negara sedang berkembang biasanya

---

<sup>6</sup> Portal Nasional RI, "*sumber Daya Alam Jawa Tengah*" diakses dari <http://www.indonesia.go.id/in/pemerintah-daerah/provinsi-jawa-tengah/sumber-daya-alam> pada tanggal 11 april 2015

<sup>7</sup> Diakses dari data Badan Pusat Statistik; *Seri 2010] Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi, 2010-2014 (Ribu Rupiah)*" (PDF) Jakarta: Badan Pusat Statistik. Hal. 134.

<sup>8</sup> Tempo News, "*Investasi Asing di Jawa Tengah Tak Capai Target*" diakses dari <http://www.tempo.co/read/news/2015/03/22/058651919/Investasi-Asing-di-Jawa-Tengah-Tak-Capai-Target> pada tanggal 11 April 2015

<sup>9</sup> Paul Krugman, *Majalah SWA*, 05/XIV/5-18 Maret 1998 dalam Sidik Jatmika, "*Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional*", Bigraf, Yogyakarta, 2001, hal.77

<sup>10</sup> Hadidtya Surya Nugraha, *Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Belanja Daerah Terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Tengah Tahun 1980-2012*, Semarang, Universitas Diponegoro, 2014, hal. 10-11

memiliki problem awal dalam pembangunan daerah, yaitu terletak pada kelangkaan keberadaan modal untuk pembangunan itu sendiri. Jadi investasi asing sangat dibutuhkan sebagai syarat baru dalam membangun sebuah harapan suatu daerah dan negara. Investasi dari penanaman modal asing (PMA) masih cukup minim di Jawa Tengah. Pada tahun 2013, dari Rp17 triliun realisasi investasi perusahaan besar dan menengah untuk PMA hanya mencapai Rp. 1 triliun, sedangkan Rp16 triliun masih didominasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Menurut Kepala Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) tahun 2013 Yuni Astuti, dengan masih sedikitnya investasi dari asing justru menjadi peluang bagi Jawa Tengah untuk menarik penanaman modal asing.<sup>11</sup> Dalam hal ini bagaimana pemerintah daerah termasuk Kabupaten dan Kota serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengupayakan supaya investor asing semakin tertarik menanamkan modalnya di Jawa Tengah. Faktor lain rendahnya investasi juga diakibatkan Provinsi Jawa Tengah masih kekurangan kawasan industri. Di Provinsi Jawa Tengah, khususnya di kota Semarang, kawasan industri hanya berjumlah enam buah, dan di kabupaten Cilacap hanya ada satu buah.

Kepala BPMD 2013 mulanya optimis pada tahun 2014 Provinsi Jawa Tengah akan mengalami peningkatan investasi dari pihak asing, Hal tersebut dikarenakan pada 2014 pemerintah Provinsi Jawa Tengah berencana memfokuskan pada pembangunan infrastruktur, termasuk jalan. Namun, pada tahun 2014, investasi asing di Provinsi Jawa Tengah juga belum mampu mencapai target. Adapun realisasi penanaman modal asing (PMA) pada tahun 2014 hanya Rp 6,5 triliun, sementara izin prinsipnya sekitar Rp 100 triliun. Pencapaian PMA sangat jauh dari jumlah yang ditargetkan. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 Sujarwanto Dwiatmoko Sujarwanto mengungkapkan bahwa investasi asing tidak berhasil di Jawa Tengah.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Andik Sismanto, “*Sindo News: Realisasi PMA di Jawa Tengah Masih Minim*” diakses dari <http://ekbis.sindonews.com/read/820674/33/realisasi-pma-di-jateng-masih-minim-1387982289> pada tanggal 15 Februari 2016

<sup>12</sup>Tempo News, “*Investasi Asing di Jawa Tengah Tak Capai Target*” diakses dari <http://www.tempo.co/read/news/2015/03/22/058651919/Investasi-Asing-di-Jawa-Tengah-Tak-Capai-Target> pada tanggal 11 April 2015

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut; Mengapa Jawa Tengah gagal dalam mencapai izin prinsip investasi asing tahun 2013-2014?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dan berusaha dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan kerjasama internasional dengan pihak asing.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah Jawa Tengah dalam menarik investor asing.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh dan hambatan apa saja yang didapatkan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dalam melakukan kebijakan dalam mendapatkan penanam modal asing di provinsi Jawa Tengah. Untuk mengetahui dan menganalisa praktek diplomasi di provinsi Jawa Tengah dalam mendapatkan penanam modal asing.

## **D. Kajian Pustaka**

Dalam buku *Paradiplomasi: Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda di Indonesia* oleh *Takdir Ali Mukti*<sup>13</sup> menjelaskan bahwa Paradiplomasi merupakan fenomena baru dalam kajian hubungan internasional. Kewenangan pemerintah daerah melakukan hubungan internasional memang tidak wajib, namun telah menjadi keniscayaan dalam praktik pemerintah daerah karena telah arus globalisasi dunia yang telah merambah ke seluruh pelosok nusantara. Pemda selaku pelaksana pemerintahan yang juga pengambil keputusan dalam kebijakan publik yang strategis seperti investasi dan perdagangan, akan sangat ketinggalan apabila tidak membaaur ke dalam pergaulan masyarakat internasional. Dengan kerangka hukum dan teknis yang sedemikian rupa, banyak sekali kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh pemda baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

---

<sup>13</sup> Takdir Ali Mukti, 2013, Hal. 6

Dijelaskan juga dalam buku tersebut ditemukan sebuah kenyataan bahwa para birokrat di pemda provinsi, kabupaten dan kota yang sebelumnya nyaris tidak pernah bersentuhan dengan hubungan antar bangsa, jelas akan mengalami banyak nesulitan yang berkaitan dengan ‘*diplomatic skill*’ maupun pengalaman praktis berhubungan dengan pihak asing. Padahal, dalam pelaksanaan kewenangan hubungan internasional itu diperlukan kemampuan yang cukup untuk menjalin relasi dan negosiasi, termasuk didalamnya penguasaan atas hukum daan kode etik hubungan antar bangsa. Tentu saja, ini akan berakibat pada kualitas produk kerjasama yang dibuat dengan berbagai pihak asing tersebut belum optimal dalam mendorong laju pembangunan daerah. Bahkan sebaliknya, justru hanya akan memboroskan keuangan daerah (APBD) karena pejabatnya sering keluar negeri. Pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan kerjasama internasional di daerah menjadi sangat penting sebab dengan munculnya kewenangan baru bagi daerah otonom akan secara otomatis berdampak pada penganggaran daerah. Pengawasan ini bukan saja bertujuan untuk mencegah timbulnya pemborosan anggaran daerah, namun bertujuan pula untuk menjaga agar pihak asing selalu menaati kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat.<sup>14</sup>

Sedangkan dalam buku *Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional* oleh *Sidik Jatmika*,<sup>15</sup> dipaparkan berbagai faktor yang mempengaruhi investasi. Ada beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli dalam kaitannya dengan berbagai faktor yang mempengaruhi modal asing. Diantaranya adalah teori dari Alan M. Rugman yang menyatakan ada dua faktor terpenting yang mempengaruhi penanaman modal asing. Yaitu variable lingkungan dan variable internalisasi. Variabel lingkungan sering dikenal dengan istilah keunggulan spesifik negara atau faktor spesifikasi lokasi. Ada 3 unsur yang membangun variable lingkungan yaitu: ekonomi, non-ekonomi dan pemerintah. Variable ekonomi membangun fungsi produksi suatu negara secara kolektif, yang secara definitive meliputi semua input faktor yang ada di masyarakat, antara lain tenaga kerja, dan modal (dana), teknologi, tersedianya sumber daya alam dan ketrampilan manajemen yang disebut sebagai human capital. Adapun variable non-ekonomi yang memotivasi masuknya modal asing adalah keseluruhan kondisi politik, budaya dan sosial yang melekat pada suatu negara. ada beberapa pengamat yang juga memasukkan faktor pemerintahan yang bersih dan berwibawa

---

<sup>14</sup> Takdir Ali Mukti, 2013, hal. 7

<sup>15</sup> Sidik jatmika, 2001, hal. 78

pada suatu negara (*clean government and good governance*), baik tuan rumah (*host country*) ataupun pemerintah asal penanaman modal itu.<sup>16</sup>

Menurut *Ahmad Harakan* dalam tesisnya yang berjudul *Peran Diplomasi Investasi Asing Dalam Praktek Paradiplomasi (Studi Kasus : Kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Dalam Peningkatan Investasi Asing Pada Tahun 2007-2014*,<sup>17</sup> menerangkan bahwa Paradiplomasi merupakan suatu bentuk keistimewaan yang diberikan kepada pemerintah-pemerintah daerah untuk bisa melakukan kerjasama dengan pihak asing, paradiplomasi juga semakin menguatkan akan hadirnya era baru bernama otonomi daerah. Sehingga para pemerintah Propinsi bisa mengenalkan dan menawarkan potensi daerah yang dimiliki secara langsung sebagai pelaku hubungan internasional sebagai langkah awal penjajakan kerjasama dengan pihak asing. Aturan mengenai pelaksanaan paradiplomasi pun sudah tertuang dengan jelas dalam undang-undang dan peraturan menteri mengenai kerjasama internasional, sehingga bisa memudahkan secara legal untuk daerah-daerah dalam melaksanakan kerjasama-kerjasama asing.

Dan tidak dapat dipungkiri dengan peningkatan investasi asing ini telah memberi manfaat-manfaat yang terasa langsung bagi daerah, apalagi Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah di Indonesia yang sangat potensial sebagai pintu Kawasan Timur Indonesia. Meskipun demikian, dalam beberapa tahun Sulawesi Selatan mengalami eskalasi konflik yang tinggi, mulai dari konflik rasial, konflik sosial dan konflik agrarian. Suatu kondisi yang dimana membawa efek domino, dikarenakan setelah kejadian tersebut, maka sensitifitas terhadap etnis non pribumi semakin tinggi, sedikit saja ada gesekan, maka akan dengan cepat tersebar isu dan aksi-aksi untuk melakukan pengganggangan terhadap etnis non pribumi tersebut. Konflik yang terjadi dan adanya kerawanan konflik tentunya mengakibatkan penderitaan bagi masyarakat baik berupa korban jiwa manusia, kerugian harta benda maupun kerusakan lingkungan serta musnahnya hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai antara lain kerusakan sarana dan prasarana serta fasilitas umum, penderitaan, ketakutan dan trauma masyarakat dan lain sebagainya. Kemudian apabila berdasarkan pendapat Alan M. Rugman diatas maka tentunya kondisi tersebut sangat mengganggu

---

<sup>16</sup> Ibid,

<sup>17</sup> Ahmad Harakan, *Peran Diplomasi Investasi Asing dalam Praktek Paradiplomasi*, Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2014. Hal. 129

dan dapat menjadi alasan mengurungkan niat dari investor asing untuk menanamkan modal di Sulawesi Selatan, dikarenakan hal tersebut dapat dipahami manakala para investor biasanya berinvestasi untuk jangka waktu yang relative panjang, sehingga mereka harus yakin bahwa investasinya tidak akan merugi hanya karena kondisi keamanan yang berubah-ubah. Akhir dari keadaan itu bisa berefek pada penundaan, pengalihan lokasi bahkan pembatalan investasi di Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam Tesis *Pengaruh Kualitas Pemerintahan Terhadap Tingkat Penanaman Modal Asing di Negara-negara ASEAN periode 2002-2008*, oleh Nicky Alvita,<sup>18</sup> bahwa penanaman modal asing dipengaruhi 3 variabel yang digunakannya dalam penelitian tersebut. Menurut Oierre Guillanne Meon dan Khalid Sekka dalam “*FDI Waves, Waves of Neglect of Political Risk*”. Variabel tersebut adalah *voice and accountability* dan *political stability and absence of violence*. Hal ini dikarenakan pemerintah lebih mengutamakan ‘suara’ perusahaan lokal yang menolak masuknya perusahaan asing pada jenis industri yang sama akibat menghindari persaingan, sehingga semakin *accountable* pemerintah terhadap badan usaha lokal, semakin rendah PMA yang masuk ke negara bersangkutan. dan *political stability and absence of violence*, hal ini dikarenakan adanya aksi *profit taking* oleh para investor asing yang ingin mendapat keuntungan lebih jika berinvestasi di negara yang kondisi politiknya tidak stabil dari pada berinvestasi di negara dengan kondisi politik yang stabil sehingga hasil investasi yang didapatkan hanya sebatas apa yang seharusnya. Dan *rule of law* dalam penelitian yang dilakukan oleh Peter Boettke dan Robert Subrick. 2003 dalam “*Rule of Law, Development, and Human Capabilities*”. Hal ini berkaitan dengan rasa aman para investor asing, di mana investor asing akan menanamkan modalnya di negara yang telah melakukan hukum dengan pasti sehingga investasi mereka pun aman.

## **E. Kerangka Pemikiran**

### **1. Konsep Penanaman Modal Asing/ Investasi Asing**

Modal merupakan salah satu prasyarat pertumbuhan ekonomi. Menurut Paul Krugman, dalam tesisnya menggambarkan bahwa angka pertumbuhan perokonomian

---

<sup>18</sup> Nicky Alfita Avianti. ‘*Pengaruh Kualitas pemerintahan Terhadap tingkat penanaman Modal Asing di Negara-Negara ASEAN Periode 2002-2008*’, Semarang, Universitas Diponegoro, 2010. Hal. 112

Asia yang menajubkan sebetulnya didorong oleh masuknya modal asing.<sup>19</sup> Negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia biasanya memiliki problem besar berkenaan dengan kelangkaan modal pembangunan ekonominya, harus berupaya menarik modal asing. Selain itu, PMA juga mendorong terjadinya pertukaran keterampilan manajerial dan masuknya teknologi - teknologi baru di antara negara-negara yang terkait.<sup>20</sup>

Lyuba Zarsky menyebutkan bahwa *“Investment is the lifeblood of economic growth - sustainable or otherwise. For rich and poor alike, investment is of especial importance in charting a global path to sustainable development. Investment is needed to nurture the institutions, technologies, organizations, ideas and values that could allow humans the world over to live well while preserving the Earth’s ecosystems-the essence of sustainable development”*<sup>21</sup>

Menurut Lyuba Zarsky dalam bukunya yang berjudul *International Investment for Sustainable development* menyebutkan bahwa Investasi adalah darah dari pertumbuhan ekonomi - yang berkelanjutan atau sebaliknya. Itu berarti investasi merupakan arus utama bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi disuatu negara. penanaman modal asing adalah salah satu bentuk dari bantuan asing yang berperan guna mengatasi tabungan (sebagai sumber modal) dan kekurangan valuta asing. Kekurangan tabungan menyebabkan kesulitan membiayai penanaman modal. Kekurangan valuta asing menimbulkan kesulitan dalam membiayai kebutuhan impor.<sup>22</sup>

## 2. Konsep Negosiasi

Negosiasi adalah proses upaya untuk mendapatkan apa yang diinginkan dari pihak lain, karena jika tidak ada kebutuhan dan persetujuan dari pihak lain tidak akan ada negosiasi. Dalam konteks yang lebih luas, hubungan internasional, negosiasi dianggap sebagai alur utama dalam hubungan antar pemerintah dan negara dalam berbagai bidang: politik, sosial-budaya, agama, etnis, ekonomi-perdagangan, lingkungan hidup, hak-hak azasi manusia (HAM), serta pertahanan-keamanan

---

<sup>19</sup>Paul Krugman, *Majalah SWA*, 05/XIV/5-18 Maret 1998

<sup>20</sup> Bosworth, Barry dan Susan M Collins. 1999. *Capital Flow to Developing Economies: Implications for Saving and Investment*.

<sup>21</sup> Lyuba Zarsky, *“International Investment for Sustainable Development”*, Earthscan, London, 2005, hal. 1

<sup>22</sup> Sidik Jatmika, 2001, hal. 77

(Hankam) atau militer.<sup>23</sup>

Negosiasi menurut Roger Fisher & William Ury, *negotiation is a basic means of getting what you want from others, it is back forth communication designed to reach an agreement when you and other side have some interest that are shared and other that are opposed.*<sup>24</sup>

Pada hakekatnya tujuan melakukan negosiasi adalah untuk menghasilkan win-win solution melalui saling pemahaman dari kedua belah pihak yang bernegosiasi, dimana diantara keduanya memperoleh apa yang diinginkan masing-masing, serta diantara mereka tidak ada yang dirugikan. Ketergantungan timbal balik inilah yang melandasi adanya kesempatan untuk memperjuangkan suatu kepentingan. Sifat saling ketergantungan merupakan landasan bagi terciptanya interaksi negosiasi. Di dalamnya terdapat jenis-jenis kepentingan, jumlah, status, kendala dan peluangnya. Tujuan dari dilakukannya negosiasi adalah untuk mencapai kesepakatan. Kesepakatan ini hanya dapat dicapai melalui usaha dan kiat-kiat tertentu oleh negosiator yang mumpuni.<sup>25</sup> Negosiasi juga menjadi salah satu unsur penting dalam usaha pemerintah pusat maupun pemerintah daerah guna mencapai target investasi dari negara lain atau perusahaan asing milik negara asing. Negosiasi berperan untuk bagaimana pihak pemerintah dapat mencapai kepentingannya dan memberikan penawaran keuntungan yang akan dicapai oleh para investor yang akan dituangkan dalam perjanjian internasional pemerintah dengan pihak asing yang berisi rezim-rezim untuk mengatur jalannya kerjasama dan memiliki tujuan akhir kedua pihak antara pemerintah dan pihak asing akan sama-sama mendapatkan keuntungan.

Ekspektasi dan kepentingan negara yang berbeda-beda disatukan dalam sebuah rezim melalui proses negosiasi. Sebuah rezim dapat dilembagakan menjadi perjanjian internasional yang berperan sebagai subyek sekaligus sumber hukum internasional yang bersifat legally binding. Proses negosiasi dalam suatu rezim dijelaskan oleh William Zartman sebagai berikut:

*“Regime building is ongoing negotiation. Getting it done-the process describing how regime goals are achieved. Activities have another important attribute in common: they are all negotiation process, negotiations that occur on the domestic as well as the international level. Getting it done, includes all*

---

<sup>23</sup> Patrice Lumumba, “Negosiasi dalam Hubungan Internasional”, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hal.

2

<sup>24</sup> Ibid, hal. 6

<sup>25</sup> Ibid hal.10

*of the activities required to implement cooperative regime, be those regimes, designed to monitor world trade, promote european security protect the ozone layer, protect human rights, or notify other states in the event of the nuclear accidents. Our focus is not only in the institutional structure, substantive goals, and achievements of the regimes discussed in this book but also on how the regimes get their work done.*"<sup>26</sup>

Dari pernyataan Zartman di atas, sebuah rezim terbentuk dari proses negosiasi yang berlangsung secara terus menerus. Proses negosiasi ini berlangsung di level internasional dan di level domestik. Di level internasional, negosiasi dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan akhir dari suatu rezim. Sedangkan di level domestik, negosiasi dilakukan oleh masing-masing negara anggota untuk mengimplementasikan norma dan peraturan yang terdapat dalam rezim tersebut. Dengan demikian, pembentukan rezim tidak hanya berfokus pada struktur internasional yang bertujuan agar rezim berjalan efektif, namun juga mengenai *compliance* atau kepatuhan negara anggota terhadap suatu rezim. Konsep *compliance* sendiri masih menjadi konsep yang masih sulit diverifikasi secara empiris.<sup>27</sup> Secara umum, teori *compliance* menjelaskan adanya penyesuaian antara tingkah laku aktor dan aturan yang telah terspesifikasi dalam rezim.<sup>28</sup>

*Abram Chayes dan Antonia Handler Chayes* dalam *On Compliance* mengartikan kepatuhan atau *compliance* ketika negara yang terlibat dalam sebuah rezim internasional mampu mengontrol tindakannya untuk berusaha mematuhi kesepakatan yang telah disepakati dalam rezim tersebut.<sup>29</sup> *Beth Simmons* mengutip argumen *Oran Young* yang menyatakan bahwa kepatuhan atau *compliance* dapat dilihat ketika subyek sebuah perjanjian atau rezim melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan apa yang telah disepakati.<sup>30</sup> Dalam perkembangannya, teori *compliance* sering dikaitkan dengan dua konsep utama rezim, yaitu implementasi dan efektivitas. Implementasi dapat dilihat dari langkah-langkah pemerintah yang dimulai dari

---

<sup>26</sup> W. Zartman, B. I. Spector, "*Post Agreement Negotiation and International Regime*", Cambridge University Press, 1997

<sup>27</sup> A. Chayes, A.H. Chayes, "*On Compliance, International. Organization*", vol. 47, no.2, 1993. Hal. 176

<sup>28</sup> R. Fisher, "*Improving Compliance with International Law*" New York, The University Press of Virginia, Hal. 20

<sup>29</sup> Op. Cit. Hal. 190

<sup>30</sup> B. A. Simmons, "*Compliance with International Agreements*", Annual Review of Political Science, vol. 1., 1998, hal. 79-9

peletakkan dasar-dasar komitmen rezim internasional di level domestik, pembentukan institusi dan enforcement terhadap norma dan peraturan rezim. Meskipun implemementasi adalah salah satu bentuk kepatuhan, level compliance yang tinggi tidak ditunjukkan melalui implementasinya, melainkan melalui efektivitas yang lebih mengimprovisasi obyektivitas kebijakan suatu negara dalam mencapai tujuan mereka.<sup>31</sup>

Rezim atau regulasi merupakan sebuah pegangan atau pedoman dalam sebuah sistem dalam mengaplikasikan atau mengimplementasikan kebijakan-kebijakan. Namun dalam pelaksanaannya apakah regulasi tersebut kemudian menjadi efektif atau tidak efektif. Dalam perkembangan teori *Compliance*, sering dikaitkan dengan dua konsep utama rezim, yaitu implementasi dan efektivitas. Implementasi dapat dilihat dari langkah-langkah pemerintah yang dimulai dari peletakkan dasar-dasar komitmen rezim di level domestic. Meskipun implemementasi adalah salah satu bentuk kepatuhan, level compliance yang tinggi tidak ditunjukkan melalui implementasinya, melainkan melalui efektivitas yang lebih mengimprovisasi obyektivitas kebijakan suatu negara dalam mencapai tujuan mereka. Pihak-pihak dalam sebuah sistem yang tetap *consist* terhadap agreement atau rezim yang dibangun, dan sering kali berusaha patuh terhadap agreement dan rezim, didalam pelaksanaannya sering kali mengekesampikan efektivitas. Seperti patuh terhadap regulasi diwilayah politik, efektivitas dalam hal ekonomi memiliki kemungkinan akan terkesampingkan. Penanaman modal Asing di Jawa tengah tergolong tidak berhasil. Menurut analisa dalam teori compliance bahwa regulasi penanaman modal khususnya modal asing beberapa aturan dirasa memiliki potensi atau mengarah pada ketidakefektivitasan. Hal ini dijelaskan juga dalam jurnal, *Compliance and Post-Agreement Bargaining* oleh Christer Jonsson dan Jonas Tallberg:

*“the management school argues that compliance with international agreements is generally quite good. Compliance rather than defection is adopted as the background assumption, a position which is affirmed by practitioners. In real life international relations, states meet their commitments almost all the time, it is argued. Second, this high level of compliance has been achieved in the absence of enforcement. As concluded by Chayes and Chayes in their survey of*

---

<sup>31</sup> K. Keohane, Robert O., “*International Relations and International Law: Two Optics*”, Harvard Journal of International Law, vol. 38, no.2, p.7

*125 international treaties, 'sanctioning authority is rarely granted by treaty, rarely used when granted, and likely to be ineffective when used.'*<sup>32</sup>

Yang itu berarti sebuah regulasi akan menjadi efektif apabila design dari regulasi tersebut cukup baik dan disertai dengan implementasi yang baik. Implementasi cenderung akan mengikuti apabila regulasi itu sendiri cukup baik. Management School merupakan bagian dari Compliance Theory yang menginspesifikasi keselarasan antara tingkah laku actor dan aturan atau rezim yang telah disepakati. Management School secara umum melengkapi Compliance Theory untuk melihat efektif atau tidaknya sebuah aturan dari implementasi aturan itu sendiri. Management school tidak berbicara tentang tingkah laku actor atau implementasinya, management school berbicara tentang aturana atau rezim yang mengatur tingkah laku actor. dalam Compliance theory maka tingkah laku aktor dari implementasi aturan atau rezim digunakan untuk melihat keefektivitasan aturan itu sendiri.

### **3. Konsep paradiplomasi**

Istilah '*Paradiplomacy*' pertama kali muncul pada tahun 1980-an oleh ilmuwan asal Basque, Panayotis Soldatos. Hal tersebut sebagai penggabungan istilah '*Parallel diplomacy*' menjadi '*Paradiplomacy*'. Menurut Aldecoa, Keating dan Boyer hal tersebut mengacu pada makna '*the foreign policy of non-central governments*'. Istilah lain yang digunakan oleh Ivo Duchacek (1990) untuk konsep ini adalah '*micro-diplomacy*'.<sup>33</sup>

Dalam Buku Paradiplomasi, Takdir Ali Mukti menyebutkan bahwa,

*"Paradiplomasi mengacu pada perilaku dan kapasitas untuk melakukan hubungan luar negeri dengan pihak asing yang dilakukan oleh entitas 'sub-state', pemerintah lokal/regional/pemerintah daerah, dalam rangka kepentingan mereka secara spesifik."*<sup>34</sup>

Dalam era globalisasi ini maka tentunya keberadaan paradiplomasi menjadi fenomena yang kuat seiring dengan terbukanya akses dan meningkatnya peran dan

---

<sup>32</sup> Christer Jonsson dan Jonas Tallberg, "*Compliance and Post-Agreement Bergaining*", European Journal of International Relations Copyright, SAGE Publications, London, 1998, hal. 374

<sup>33</sup> Op. Cit hal. 2

<sup>34</sup> Ibid

pengaruh aktor non negara dalam arena hubungan internasional. Quincy Wright dalam buku *The Study of International Relations* menyatakan bahwa Hubungan Internasional menyangkut hubungan yang berlangsung antara “...

*Varied Types of Groups – nation states, governments, peoples, regions, alliances, confederations, international organizations, even industrial organizations, cultural organizations, religious organizations.*

Berbagai jenis kelompok – negara bangsa, pemerintahan, rakyat, wilayah, persekutuan, konfederasi/persyarikatan, organisasi internasional, termasuk didalamnya adalah organisasi industri/perdagangan, organisasi budaya, organisasi agama).<sup>35</sup>

Pemerintah lokal anatau lokal government baik tingkat I maupun tingkat II dapat dikatakan sebagai aktor baru dalam studi maupun pelaksanaan hubungan internasional. Pola hubungan internasional dengan munculnya actor baru bernama pemerintah daerah (*local government*) mempengaruhi pengembangan model hubungan yang bersifat transnasional.

## **F. Hipotesa**

Pemerintah Jawa Tengah tidak berhasil mencapai target nilai izin prinsip investasi asing pada tahun 2013-2014 karena;

1. faktor ketidakelarasan dalam tata ruang,
2. rintangan dalam pengembangan infrastruktur dan
3. regulasi yang tumpang tindih.

## **G. Metodologi penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode eksplanatif. Metode eksplanatif bertujuan untuk menganalisa mengapa investasi asing di Jawa Tengah tidak berhasil atau tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Dari penelitian ini juga akan ditemukan faktor-faktor yang menghambat perkembangan investasi asing di Jawa Tengah.

---

<sup>35</sup> Op.cit, hal. 48

## 2. Lokasi dan Jangkauan Penelitian

Untuk menghindari melebarnya penjelasan mengenai efektifitas paradiplomasi dan kebijakan pemerintah provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan investasi asing, maka dibutuhkan jangkauan penelitian yang berfungsi untuk memfokuskan penelitian ini, jangkauan penelitian ini pada tahun 2013-2014 dan berlokasi di Provinsi Jawa Tengah. Diperoleh periode tersebut karena dalam 2 tahun tersebut, investasi Asing di Jawa Tengah tidak mencapai target nilai ijin prinsip.

### H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik *library research* yaitu dengan cara mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan investasi Asing di Propinsi Jawa Tengah seta data-data yang mendukung dalam menganalisis masalah yang telah disebutkan sebelumnya. Data-data tersebut berupa buku-buku, dokumen, artikel, jurnal dan surat kabar atau majalah yang menunjang penelitian yang dilakukan. Selain itu, *observasi lapangan* secara langsung juga menjadi salah satu teknik pengumpulan data yang akan dilakukan. Adapun, langkah-langkah observasi yang dilakukan dalam penelitian ini melalui metode wawancara terhadap orang-orang yang dianggap dapat memberikan informasi yang dibutuhkan bersangkutan dengan judul yang diangkat untuk diteliti dan dapat dipercaya kebenarannya.

Adapun tempat-tempat yang telah dikunjungi selama pengumpulan data, yaitu Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Jawa Tengah, Kantor Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) wilayah Jawa Tengah dan perpustakaan-perpustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dari informan secara mendalam guna mendapatkan informasi yang obyektif. Sedangkan data sekunder diperoleh dari teknik pengumpulan data melalui *library research*, yaitu penelusuran literatur data kepustakaan dari berbagai terbitan resmi yang terdiri dari

---

<sup>36</sup>Husain Umar. 2002. "Metode Riset Komunikasi Organisasi." Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Hal. 131.

buku, dokumen, jurnal, majalah dan surat kabar.<sup>37</sup>

## **I. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan pada penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab, yaitu:

*BAB I*, Pendahuluan. Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, jenis penelitian, lokasi dan jangkauan penelitian, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

*BAB II*, Investasi asing di Jawa Tengah. Bab ini berisi gambaran umum Jawa Tengah meliputi sejarah dan potensi Jawa dalam investasi asing dan gambaran PRDB Jawa Tengah.

*BAB III*, Regulasi Investasi Asing di Indonesia. Bab ini menggambarkan tentang investasi asing dalam daerah melalui regulasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, regulasi penanaman modal dan kebijakan penanaman modal di Jawa Tengah.

*BAB IV*, Faktor-faktor yang menyebabkan investasi di Jawa Tengah tidak efektif. Bab ini akan membahas tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dan menghambat investasi asing di Jawa Tengah.

*BAB V*, Kesimpulan. Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan di bab-bab sebelumnya.

---

<sup>37</sup> Murti Sumarni dan Salamah Wahyuni. 2006. “*Metode Penelitian Bisnis*”. Yogyakarta: Andi Yogyakarta hal. 8

